

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

UMKM atau Usaha Mikro Kecil, dan Menengah merupakan suatu faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi nasional. UMKM juga memiliki peran krusial terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 1997 dimana terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, UMKM merupakan katup penyelamat terhadap pemulihan perekonomian Negara Indonesia, dikarenakan UMKM menunjukkan dampak signifikan terhadap PDB atau penyerapan tenaga kerja (Ravik, 2007).

Data KUKM (Kementerian Koperasi usaha kecil dan menengah) periode 2018, dimana pelaku usaha mikro kecil menengah sejumlah 64,2 Juta ataupun sebanyak 99,99 persen dari semua pelaku usaha yang ada di Indonesia. UMKM memiliki daya serap tenaga kerja yang lebih tinggi sebesar 97%. Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK) UMKM juga memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.

Keunikan dari UMKM tidak berbeda jauh dengan usaha besar. UMKM memiliki karakteristik berbeda dengan usaha kecil, menengah dan mikro dilihat dari berbagai aspek. Pengusaha mikro kecil menengah mempunyai gagasan untuk mencari keuntungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Pihak perbankan lebih mementingkan usaha mikro dalam memberikan pendanaan. Hal ini disebabkan usaha mikro mempunyai pasar yang memiliki potensi guna dilayani dalam rangka peningkatan fungsi intermediasi. Usaha mikro memiliki model yang positif dan negatif, sehingga tidak ada pada usaha non mikro lainnya (Halim, 2020).

Definisi dan karakteristik dari UMKM tidak berbeda dengan usaha besar. UMKM memiliki inisiatif untuk mencari penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bank melihat bahwa aspek usaha mikro memiliki peluang pasar yang potensial dalam memberikan layanan dalam usaha meningkatkan

intermediasi perbankan. Hal ini disebabkan karena usaha mikro memiliki karakter yang sangat baik untuk suatu usaha (Hidayat dan Fadillah, 2011).

Pemerintah Indonesia mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menolong UMKM dalam permasalahan modal usaha. Program ini berlaku sejak pemerintahan SBY menerbitkan Instruksi Presiden RI no 5 tahun 2008 yang menyatakan bahwa fokus utama agenda yaitu dalam usaha mempercepat pemberian jaminan ekonomi dan menyalurkan kredit. KUR merupakan pendanaan yang diberikan kepada UMKM berupa investasi dan pendanaan kerja diberikan sebagai usaha produk yang pemberiannya melalui bank bank serta adanya penjaminan. Sumber dana KUR ini sepenuhnya yaitu bank pemerintah dengan jumlah RP 25.000.000 per debitur. Hal ini disebabkan UMKM telah menyediakan 99,46% lapangan pekerjaan baru di Indonesia, maka dari itu KUR lebih diutamakan untuk kelompok UMKM. Peranan UMKM sangat besar dalam membangun ekonomi karena memiliki daya serap tenaga kerja yang besar serta memanfaatkan sumber daya alam lokal berupa bidang pertanian (Aidil, 2014).

UMKM menunjukkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki UMKM lebih kurang 580.000 UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat. 88% dalam bentuk usaha kecil menengah sederhana. Usaha kecil menengah sederhana memberikan peran sebagai sumber pendanaan yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah Sumatera Barat. Adapun UMK (Usaha Mikro Kecil) di Kabupaten/kota Sumatera Barat ditunjukkan pada tabel dibawah (BPS Sumbar, 2017).

**Tabel 1.1 . UMK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahunan 2017**

| Kabupaten/Kota | Jumlah | Persentase (%) |
|---------------------------|---------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Kepulauan Mentawai | 4.624 | 0.8 |
| Pesisir selatan | 42.495 | 7.32 |
| Solok | 37.115 | 6.4 |
| Sijunjung | 29.056 | 5.01 |
| Tanah Datar | 45.137 | 7.78 |
| Padang Pariaman | 43.576 | 7.51 |
| Agam | 56.592 | 9.75 |
| Lima Puluh Kota | 47.549 | 8.19 |
| Pasaman | 25.981 | 4.48 |
| Solok Selatan | 15.559 | 2.68 |
| Dharmasraya | 22.409 | 3.86 |
| Pasaman Barat | 38.574 | 6.65 |
| Padang | 89.699 | 15.46 |
| Kota Solok | 9.843 | 1.7 |
| Sawah Lunto | 8.719 | 1.5 |
| Padang Panjang | 9.089 | 1.57 |
| Bukittinggi | 22.2 | 3.83 |
| Payakumbuh | 18.996 | 3.27 |
| Pariaman | 13.131 | 2.26 |
| Sumatera Barat (Provinsi) | 580.344 | 100 |

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar 2017

Data tabel 1.1 bisa di jelaskan yaitu jumlah serta persentasi UMK berdasarkan Kab/Kota di Wilayah Sumatera Barat periode 2017 pada posisi pertama di tempati oleh kota Padang, lalu yang kedua ditempati oleh Agam, yang ketiga Lima Puluh Kota, yang keempat ditempati oleh Tanah Datar, dan yang kelima baru ditempati oleh Padang Pariaman dengan persentase sebesar 7,51%. Padang Pariaman memiliki banyak UMKM yang bisa dilaksanakan dalam usaha meningkatkan pendapatan para pedagang, petani/berladang dan lain-lain. Kab Padang pariaman sendiri memiliki luas sawah 62.303 ha, dengan luas hasil panen 61.708 ha.

Data BPS tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman sendiri memiliki sawah dengan luas tanam padi 62.303 hektar, luas panen padi 61.708 hektar. Padang pariaman memperoleh produksi padi 293.360 ton atau sebanyak 159.334,11 ton.

Padang pariaman mempunyai kelompok tani lebih kurang 1.200 dengan traktor roda 2 sebanyak 1.179. Irigasi Sawah yang ada di Padang pariaman dialiri irigasi Teknis Anai I dengan luas yang dialiri 8000 Ha, dan Teknis Anai II 5000 Ha (BPS, 2022).

Pada umumnya masyarakat Padang Pariaman bermata pencarian petani. Kabupaten ini memiliki daerah agraris yang memiliki potensi sektor pertanian. Sektor pertanian di kabupaten ini mampu meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat upaya ekstensifikasi dan intensifikasi dari pertanian. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dilakukan pengembangan kelembagaan kelompok tani dari tahun ke tahun dalam upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pertanian. Adapun faktor penyebab rendahnya produktivitas pertanian yaitu karena keterbatasan modal guna membeli benih, pupuk dan obat-obat yang berkualitas (Hafidh, 2009).

Mosher (1965) mengatakan bahwa usaha tani merupakan permukaan bumi yang digunakan untuk bercocok tanam atau memelihara ternak oleh seseorang, keluarga atau badan usaha. Usaha tani dapat berupa sebidang tanah. Usaha tani dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tepat. Petani hendaknya memperhatikan penggunaan faktor produksi agar mencapai produksi yang optimal sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dengan menggunakan kombinasi faktor produksi diharapkan dapat mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi (Siagian, 2003). Pendapatan usaha tani yaitu selisih antara seluruh penerimaan usaha tani yang dikurangi dengan seluruh pengeluaran (biaya) dalam satu musim tanam.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha tani menurut Hermanto (2010) yaitu (1) luas usaha yang meliputi luas tanaman dan tanamad dalam suatu areal, (2) tingkat produk yang dinilai melalui daya produksi/Ha serta indicator pertanaman, (3) kombinasi serta pilihan, (4) penggunaan tenaga kerja yang efisien serta (5) pendanaan. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dimana modal merupakan faktor pendukung utama untuk meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan pertanian. Modal yaitu dana yang dimanfaatkan untuk melakukan melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Kasmir (2012)

menjelaskan bahwa modal kerja merupakan pendanaan dalam bentuk aktivitas kerja dalam kurun waktu jangka pendek. Bagi petani pada umumnya modal kerja merupakan biaya produksi.

UMKM sektor pertanian di Padang Pariaman sangatlah banyak dan lahannya juga luas, tetapi pengembangan UMKM di Padang Pariaman masih ada kendala, seperti modal yang terbatas. Terkait masalah permodalan yang terbatas, UKM membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan seperti perbankan (Cahya, dkk, 2021). Namun, akses bagi UMKM untuk menghimpun dana dari perbankan masih terbatas.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis mengangkat masalah ini untuk meneliti dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pertanian Di Kabupaten Padang Pariaman (Studi Kasus : Pertanian Di Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMKM sektor pertanian di Kabupaten Pariaman Kecamatan Enam Lingsung?
2. Bagaimana pengaruh modal setelah KUR terhadap pendapatan UMKM sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingsung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh modal sendiri terhadap pendapatan UMKM sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingsung.
2. Pengaruh modal setelah KUR terhadap pendapatan UMKM sektor pertanian di Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingsung.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai implementasi ilmu dan pembelajaran yang telah ditempuh selama perkuliahan serta tugas akhir demi mendapatkan gelar Sarjana-I Ekonomi.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan serta pemahaman pembaca mengenai KUR, modal awal dan pendapatan UMKM pada sektor pertanian.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini semoga dapat membantu pemerintah dalam menganalisis keadaan perekonomian terutama tentang pengaruh KUR terhadap perkembangan UMKM pertanian di Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Enam Lingkung serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi referensi pemerintah dalam membuat kebijakan yang dapat berdampak baik bagi perekonomian Sumatera Barat dimasa depan.

